

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai sebuah kawasan, 80 persen wilayah Asia Tenggara dikelilingi oleh perairan atau lautan. Selain digunakan sebagai jalur penghubung, ekosistem bahari yang ada dalam laut juga dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Asia Tenggara juga merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis bagi perekonomian dunia. Nilai strategis tersebut didapat dari letak geografis yang secara langsung diapit oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Untuk itu banyak kapal dagang dari seluruh dunia yang melintasi jalur perdagangan ini. Sehingga tidak dapat dipungkiri lebih dari 60 persen negara di kawasan Asia Tenggara hidup mengandalkan ekonomi pada zona maritim.¹

Meski begitu stabilitas di Kawasan Asia Tenggara, khususnya pada wilayah laut tampaknya belum sepenuhnya terlaksana. Hal itu dikarenakan berbagai aktivitas kekerasan masih sering terjadi dan tidak hanya mengancam kesejahteraan masyarakat tetapi secara langsung mengancam keamanan negara. Berbagai kasus kejahatan terjadi beriringan dengan munculnya kelompok-kelompok terorisme. Terorisme telah ditetapkan *United Nation* (UN) sebagai kejahatan transnasional.² Sehingga terlepas dari berbagai potensi strategis yang dimiliki wilayah lautnya,

¹Lieutenant John F Bradford, "The Growing Prospects For Maritime Security Cooperation in Southeast Asia," *U.S Naval War College* (2005). Hlm 63

² Andi Mappetahang Fatwa, "Terorisme Global Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Tarjih*, (2007), <https://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view/72/73>. Hlm 93

wilayah laut Asia Tenggara juga terkenal rawan akan berbagai aksi kejahatan yang dilakukan oleh kelompok teroris.³

Pada tahun 2003, dilansir dari laporan *International Maritime Bureau* (IMB) dari total 445 kasus, diantaranya kasus percobaan serta serangan yang ditujukan pada kapal dagang, sebanyak 310 kejahatan transnasional terjadi di perairan kawasan Asia Tenggara. Sehingga dapat dikategorikan wilayah perairan kawasan Asia Tenggara sangatlah rentan dan memicu tumbuhnya kasus kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia, penyelundupan obat-obatan terlarang serta terorisme di wilayah perairan ini.⁴

Menurut *Convention on Transnational Organized Crime* (UNODC) suatu kejahatan akan bersifat transnasional apabila terjadi lebih dari satu negara, perencanaan serta kontrol dilakukan di luar negara target operasi, melibatkan kelompok – kelompok tertentu, dan efek negatif dari aksi kejahatan tidak hanya dirasakan oleh satu negara.⁵

Salah satu wilayah perairan kawasan Asia Tenggara yang rentan akan kasus kejahatan transnasional adalah Laut Sulu. Kasus kejahatan yang sering terjadi di Laut Sulu adalah pembajakan kapal. Berdasarkan laporan dari IMB, intensitas terhadap aksi pembajakan kapal di perairan Sulu meningkat di tahun 2016. Sehingga selain selat Malaka, Laut Sulu juga ditetapkan sebagai lautan di Asia

³Arfin Sudirman and Deasy Silvy Sari, "Membangun Keamanan Regional Di ASEAN Dalam Menanggulangi Ancaman Terorisme," *Jurnal Wacana Politik* (2017) <http://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/view/11276>. Hlm 23

⁴ Rommel Banlaoi, "Maritime Terrorism in Southeast Asia: The Abu Sayyaf Threat," *Review* 58, no. 4 (2005): 62–80. Hlm 63

⁵ Alan Collins, *Contemporary Security Studies*. (United Kingdom: Oxford University Press, n.d.). Hlm 394

Tenggara yang rawan akan bahaya. Kasus pembajakan kapal secara tidak langsung menghambat arus perdagangan yang terjadi di Laut Sulu. Pada tahun 2016 ReCAAP kemudian mengeluarkan surat peringatan agar seluruh kapal dagang menghindari laut Sulu sebagai jalur kapal mereka beroperasi.⁶ *Abu Sayyaf Group* (ASG) merupakan kelompok separatis Islam yang bertanggung jawab atas berbagai aksi pembajakan yang terjadi di Laut Sulu.

Seperti kelompok radikal Muslim Filipina lainnya, ASG juga kelompok yang berjuang untuk mendirikan negara Islam di Filipina. Kelompok separatis ini dibentuk pada tahun 1991 oleh Abdurajak Abubakar Janjalani dan bermarkas di Selatan Filipina. Janjalani pernah belajar di Timur Tengah dengan dukungan organisasi fundamentalis yang disebut *Islamic Tabligh*. Pemikiran Janjalani semakin radikal setelah bepergian ke Arab Saudi, Libya serta negara Muslim lainnya. Saat mempelajari *Iranian Revolution* tahun 1988, Janjalani dilaporkan bertemu dengan Osama Bin Laden pemimpin Al-Qaeda kelompok teroris internasional berbahaya yang terkenal karena tragedi 9/11. Selain itu ada kemungkinan mereka sama-sama berjuang saat Uni Soviet menginvasi Afganistan. Setelah itu Janjalani kembali ke daerah asalnya Basilan, Filipina untuk meneruskan perjuangan dan misinya di Filipina⁷

Berhembus kabar, ASG didirikan dengan bantuan dana sebesar US\$ 6 juta dari Osama Bin Laden.⁸ Bantuan Al-Qaeda kepada ASG tidak berhenti saat

⁶ IPAC Report, "Protecting The Sulu-Sulawesi Seas From Abu Sayyaf Attacks," 2019.

⁷ Zack Fellman, "Abu Sayyaf Group," *Center For Strategic and International Studies (CSIS)*, no. 5 (2011), www.csis.org/.

⁸ VICE Indonesia, "Teror Di Laut Diculik Oleh Bajak Laut Afiliasi ISIS Di Perairan Filipina - YouTube," (Accessed: 14 February 2022) https://www.youtube.com/watch?v=I_iWtmiLr5g&t=1s.

kelompok terorisme Asia Tenggara tersebut baru terbentuk, dalam perjalanannya Al-Qaeda membantu ASG dalam hal dana dan pelatihan. Kedua kelompok teroris tersebut, menjalin hubungan melalui saudara ipar Bin Laden yang bernama Muhammad Jamal Khalifa. Muhammad Jamal Khalifa adalah pemimpin dari salah satu organisasi yang dikenal dengan sebutan *International Islamic Relief Organization* (IIRO) yang diketahui sebagai organisasi yang melakukan kegiatan pendanaan pada seluruh aksi terorisme di seluruh dunia. Selain itu, pemimpin Al-Qaeda juga melakukan pelatihan terorisme dan mengirimkan bantuan dana yang nantinya akan dipakai untuk kepentingan kelompok radikal Islam kedepannya yang berbasis di Selatan Filipina.⁹ Secara tidak langsung bantuan yang Al-Qaeda berikan semakin memperkuat ASG untuk melawan dan menentang pemerintah pusat Filipina dan dapat memenuhi misi mereka untuk mendirikan negara Islam di Selatan Filipina.

Sehingga aksi pembajakan laut yang terjadi di perairan Sulu merupakan pola terorisme global yang secara tidak langsung memicu instabilitas kawasan. Hal tersebut karena pembajakan yang terjadi di perairan Sulu tidak hanya sekedar kasus kriminal semata, namun kasus ini merupakan kejahatan transnasional yang menarik keterlibatan dan koneksi dengan kelompok teroris internasional Al-Qaeda untuk memperluas paham ajaran Islam Jihad yang keliru di kawasan Asia Tenggara lewat ASG.¹⁰

⁹ Fellman, "Abu Sayyaf Group."

¹⁰ Andi Mappetahang Fatwa. Op. Cit. Hlm 95.

Sejak dibentuk, ASG sudah melakukan serangkaian aksi kejahatan seperti penyelundupan narkoba kekerasan seksual dan yang paling umum adalah menculik warga sipil untuk disandera dan meminta tebusan. Berdasarkan laporan ReCAAP selama tahun 2016 terdapat 4 kasus pembajakan pada kapal berbendera Indonesia. Kasus yang pertama terjadi pada pertengahan Maret 2016, korbannya adalah Brahma 12 yang diketahui mengangkut 12 ABK. Tidak berselang lama, Kasus berikutnya terjadi pada bulan April korbannya adalah TB Henry dan Christy dengan 4 ABK. Selanjutnya TB Charles 001 dan Robby 152 beserta 7 ABK, ikut disandera pada bulan Juni 2016. Terakhir adalah kasus yang menimpah kapal Fishing Trawler yang dibajak ASG pada Juli 2016.¹¹ Dari kasus tersebut memperlihatkan bahwa pembajakan kapal memakan banyak korban berwarga negara Indonesia. Menurut *The Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia* (ReCAAP) jumlah korban pembajakan kapal di perairan Sulu mencapai 48 orang dan didominasi oleh Warga Negara Indonesia yang total berjumlah 24 orang.¹²

Kasus ini menjadi perhatian publik karena terjadi secara berturut - turut dan menyisakan pengalaman traumatis bagi setiap orang yang menjadi korban pembajakan dan penculikan yang dilakukan ASG. Seorang nelayan Indonesia yang diculik selama 20 bulan setelah memilih melaut di perairan Sulu dapat menjadi bukti nyata kekejaman yang dilakukan ASG. Pada 18 Januari 2017 seorang nahkoda kapal bernama Subandi dan dua orang rekannya diculik oleh ASG.

¹¹ReCAAP ISC, *Annual Report Piracy and Armed Robbery Against Ships in Asia 2016*, n.d., <https://www.recaap.org/resources/ck/files/reports/annual/annualreport2017.pdf>. Hlm 23

¹² Ibid.

Ketiganya dibawah memakai *speedboat* ke sebuah hutan dan dikawal langsung oleh anggota ASG yang dilengkapi dengan persenjataan lengkap. Menurut ketiga korban, ASG kerap menunjukkan rekaman pembunuhan dimana dilakukan semata untuk menakut nakuti. Setelah hampir dua tahun, pada 12 September 2018 ketiga korban kemudian dibebaskan.

Berbagai aksi kejahatan transnasional termasuk pembajakan laut yang dilakukan oleh kelompok teroris dewasa ini tidak lepas dari yang namanya globalisasi. Globalisasi membuka ruang bagi berkembangnya kejahatan transnasional.¹³ Karena globalisasi yang terjadi, didorong oleh kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi maka dari itu globalisasi membuat perkembangan aksi kejahatan semakin kompleks.

Kemajuan pada bidang teknologi dan informasi memberikan manfaat bagi setiap penggunanya, tanpa terkecuali setiap individu dapat dengan mudah mengakses data maupun informasi lewat internet. Oleh sebab itu, selain mempermudah setiap aktivitas masyarakat modern, teknologi juga memperlancar operasi yang dilakukan para pelaku kejahatan transnasional.¹⁴

Maka dari itu perlu adanya tindakan yang tegas dari negara, sebab negara bertanggung jawab penuh dalam melindungi segenap tanah air. Pernyataan tersebut wajib dijalankan oleh negara yang berdaulat, termasuk Indonesia. Sebagai negara, Indonesia harus memberikan perlindungan tersebut kepada masyarakat, karena hal

¹³ Collins, *Contemporary Security Studies*.

¹⁴ Munir, *Kurikulum Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, 2008. Hlm 1

itu pula merupakan sebuah amanat agung bangsa berdasarkan kepada alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945.¹⁵

Selain itu mendapatkan sebuah perlindungan merupakan hak setiap warga negara. Hal ini secara resmi tertuang dalam Pasal 28 D Ayat 1 UUD 1945 yang tertulis “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”¹⁶

Dikarenakan pembajakan laut sifatnya transnasional maka pemerintah Indonesia perlu melibatkan seluruh aspek kekuatan sebagai upaya untuk meanggulangi pembajakan laut di perairan Sulu yang mana melibatkan kelompok terorisme. Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini kemudian diberi judul **“STRATEGI INDONESIA PADA ISU PEMBAJAKAN LAUT DI SULU YANG DIPANDANG BERPOTENSI MENIMBULKAN INSTABILITAS KAWASAN”**. Penulis merasa bahwa isu pembajakan laut sebagai salah satu bentuk kejahatan transnational di perairan Sulu perlu dikaji lebih dalam. Hal itu dikarenakan isu ini membahayakan kedaulatan nasional, mengganggu stabilitas kawasan, serta secara tidak langsung merugikan Indonesia mencapai kepentingan nasionalnya dalam bidang ekonomi di perairan Sulu yang merupakan jalur perdagangan internasional. Untuk itu dalam menanggulangi kasus pembajakan laut, pemerintah Indonesia

¹⁵ DetikEdu, “Makna Pembukaan UUD 1945 Alinea 1-4, Begini Kandungan Tiap Alinea,” *DetikEdu*, last modified 2021, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5804954/makna-pembukaan-uud-1945-alinea-1-4-begini-kandungan-tiap-alinea#:~:text=Makna Pembukaan UUD 1945 Alinea Pertama&text=Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah,sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.>

¹⁶ Lade Sirjon, “Perlindungan Hukum Negara Indonesia Terhadap Warga Negara Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Negara Lain,” *LISANI: Jurnal Kelisanan Sastra dan Budaya* (2018), <http://journal.fib.uho.ac.id/index.php/lisani>.

kemudian melakukan berbagai upaya yang memberikan efek jangka pendek serta jangka panjang.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana strategi kerja sama yang ditempuh Indonesia dapat menumpas pembajakan laut yang mengancam keamanan dan pertahanan Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari bagian ini adalah mengetahui strategi yang pemerintah Indonesia lakukan untuk membasmi pembajakan laut di perairan Sulu yang mana menarik keterlibatan kelompok terorisme internasional. Atas dasar tujuan tersebut, lewat penelitian yang dilakukan penulis berharap dapat memberikan sebuah analisis deskriptif mengenai berbagai upaya pertahanan yang dilakukan Indonesia untuk mengatasi terorisme yang mengancam kedaulatan Indonesia dan dianggap dapat menimbulkan instabilitas di kawasan Asia Tenggara lewat pembajakan laut di wilayah perairan Sulu, baik itu upaya yang memiliki efek jangka panjang maupun upaya yang memberikan efek jangka pendek.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan penelitian yang dilakukan penulis berharap dapat menggambarkan bagaimana kasus pembajakan laut yang merupakan salah satu jenis kejahatan transnasional dapat muncul sebagai ancaman bagi kedaulatan negara dan mengganggu stabilitas kawasan dilihat dari perspektif hubungan internasional. Manfaatnya bagi pembaca dapat pengetahuan mengenai kerja sama serta arah

kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia untuk menstabilkan wilayah maritim Sulu dari bayang - bayang aksi kejahatan yang dilakukan oleh kelompok terorisme.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Bagian yang pertama pada penelitian yang dilakukan, penulis akan menjelaskan dengan rinci dasar atau latar belakang penulisan dilakukan, rumusan masalah yang akan dikaji dalam penulisan, tujuan dilakukannya penulisan, manfaat penulisan yang menjadi harapan penulis, serta seperti apa sistematika yang ada dalam penulisan kali ini.

BAB II KERANGKA BERPIKIR

Pada bagian ini penulis akan mendeskripsikan landasan teoritis dengan mengkolaborasikan teori serta konsep yang akan digunakan penulis pada penulisan ini. Selain itu, penulis akan menjelaskan sesuai dengan inti sari yang diambil dari setiap bahan referensi penyusunan tulisan ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bagian ini, berbagai metode penelitian seperti pendekatan ilmiah, metode penulisan, teknik analisis dan pengumpulan data akan dilakukan lalu dipaparkan oleh penulis sebagai bagian dari proses penting dalam penelitian. Sehingga metode yang dilakukan dapat menunjang kualitas tulisan yang dibuat.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan secara deskriptif analisa yang dilakukan terhadap pokok pembahasan yang diangkap, dengan harapan dapat menjawab rumusan masalah. Teori dan konsep yang digunakan akan membantu penulis ketika melakukan analisa dalam penulisan ini.

BAB V PENUTUP

Pada bagian yang terakhir, kesimpulan akan diambil dan dielaborasi oleh penulis berdasarkan dengan hasil pengumpulan data, analisis, serta pemaparan data yang dilakukan pada penelitian ini.

